

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR NON-ELEKTORAL POTENSI PEMICU KONFLIK PEMILU TAHUN 2024

Agus Sutisna

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Tangerang, Indonesia

Email: tisna_1965@ymail.com

ABSTRAK

Pemilu 2024 akan menjadi pemilu pertama dalam sejarah elektoral Indonesia yang akan memilih secara serentak anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, meski dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang berbeda. Hajat demokrasi ini akan berlangsung di tengah arus deras partisipasi publik berlatar ragam fenomena sosiopolitik yang diartikulasikan dalam bentuk-bentuk ekspresi gagasan dan perilaku yang mencemaskan, suatu fenomena yang telah hadir pada perhelatan Pemilu 2019 serta beberapa Pemilihan sebelum dan sesudahnya, misalnya isu politisasi agama, ras dan etnik, serta isu-isu non-elektoral lainnya. Studi ini bertujuan memetakan faktor-faktor non-elektoral yang dapat hadir mendahului dan/atau menyertai pelaksanaan Pemilu 2024 yang dapat memicu konflik elektoral. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif; metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan analisis atas beberapa fenomena sosiopolitik yang mendahului dan/atau menyertai perhelatan Pemilu. Secara hipotetik hasil kajian menunjukkan bahwa sejumlah faktor non-elektoral (sosial, politik, budaya, keagamaan, ekonomi, dan hukum) secara potensial memicu eskalasi dan penerasan konflik Pemilu 2024 yang dapat saja berujung pada terganggunya proses dan/atau delegitimasi hasil Pemilu.

Kata kunci: Pemilu 2024, non-elektoral, politisasi, konflik

NON-ELECTORAL FACTORS ANALYSIS: POTENTIAL CONFLICT TRIGGERS OF 2024 GENERAL ELECTION

ABSTRACT

The upcoming 2024 elections in Indonesia will mark a significant milestone in the country's electoral history. Notably, these elections will be unique as they will involve the simultaneous selection of many political positions, including members of the legislature, president and vice president, as well as regional leaders and deputy regional heads. It is worth mentioning that these elections will be conducted on separate dates and months. The Simultaneous Election is scheduled to occur amidst a significant surge in public engagement, accompanied by a range of sociopolitical phenomena that manifest in concerning patterns of thought and conduct. These manifestations prompt corresponding reactions and responses within the public sphere. This phenomena has manifested itself in the context of the 2019 election event, as well as in other preceding and subsequent elections. Notably, it encompasses the politicization of religion, race, and ethnicity, alongside with non-electoral concerns. The objective of this study is to identify non-electoral variables that may precede and/or coincide with the execution of the 2024 General Election, and have the capacity to incite electoral strife. The study employs a qualitative methodology, including literature reviews and analysis of various sociopolitical occurrences that occur before and/or coincide with the electoral process for data collecting. The study's hypothetical findings suggest that various non-electoral factors, including social, political, cultural, religious, economic, and legal aspects, have the potential to initiate an escalation and amplification of the conflict surrounding the

2024 Election, potentially resulting in the disruption of the electoral process and/or the delegitimization of the election results.

Keywords: *Election 2024, non-electoral, politization, conflict*

PENDAHULUAN

Pertengahan Juni tahun 2022, tepatnya Rabu 14 Juni 2022 KPU meluncurkan tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Beberapa hari sebelumnya KPU juga telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam PKPU ini dijadwalkan bahwa hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 adalah tanggal 14 Februari 2024, sementara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) ditetapkan pada 27 November 2024. Untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden penetapan waktu pemungutan dan penghitungan suara tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022.

Pemilu 2024 mendatang menjadi perhelatan elektoral yang penting untuk dicermati. Bukan saja karena momen itu menjadi sejarah pertama dalam lanskap perjalanan demokrasi elektoral Indonesia yang mana semua jabatan legislatif dan eksekutif di semua tingkatan dipilih serentak dalam tahun yang sama. Pemilu 2024 juga akan menjadi arena pertarungan, sedikitnya bagi 2 (dua) agenda sekaligus kebutuhan besar nasional. Yakni pertama menjaga integrasi dan keutuhan negara bangsa, kedua memastikan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah dapat terus dirawat dan dikembangkan.

Menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara bangsa adalah keniscayaan, satu-satunya pilihan sejarah masa kini dan masa depan yang tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun. Pada saat yang sama fakta-fakta fenomenologis sosiopolitik yang mengarah pada perpecahan, polarisasi, dan konflik sosial, eskalasinya terus bertahan pasca perhelatan Pemilu 2019, dan sewaktu-waktu dapat mengalami ledakan karena dipicu oleh satu dan lain faktor penyebab.

Simultan dengan upaya menjaga keutuhan negara-bangsa, merawat demokrasi sebagai pilihan konsensus bagaimana negara dan kekuasaan ini dikelola, yang telah dirintis dan dikonsolidasikan demikian rupa sejak Reformasi 1998 adalah juga merupakan kebutuhan saat ini dan masa depan yang tidak dapat ditawar lagi. Akan tetapi pada saat yang sama praktik demokratisasi yang tengah berlangsung ini juga telah melahirkan pelbagai distorsi dan paradoks yang kerap mencemaskan. Situasi yang demikian itu terjadi karena arus deras partisipasi dan kebebasan politik ditingkahi pula oleh menderasnya pelbagai paradoks demokrasi. Mulai dari polarisasi politik berkelanjutan khususnya sejak Pemilu 2019 dan Pemilihan sebelum dan sesudahnya, menguatnya kecenderungan penggunaan politik identitas

dalam setiap kontestasi elektoral, sebaran berita bohong atau berita palsu yang memicu bertumbuhnya infodemi yang sulit dikendalikan, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan lain-lain.

Studi ini berusaha memetakan sedikitnya 4 (empat) isu sosiopolitik yang bersifat teknikalitas atau non elektoral, yang secara hipotetik berpotensi memicu dan menghadirkan problematika dan pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik dalam kerangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Keempat isu tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, penggunaan politik identitas sebagai alat pemenangan kontestasi elektoral. *Kedua*, gejala polarisasi sosiopolitik yang terus berkelanjutan pasca Pemilu 2019 serta Pemilihan sebelum dan sesudahnya. *Ketiga*, gejala infodemi (wabah informasi) elektoral yang terakumulasi dari sebaran *hoax*, ujaran kebencian (*hate speech*), dan kampanye hitam (*black campaign*). *Keempat*, keberadaan dan perilaku *buzzer*. Fokus riset ini mendiskusikan sekaligus berusaha menjawab bagaimana keempat isu non-elektoral tersebut hadir mendahului dan/atau menyertai perhelatan pemilu yang secara potensial dapat memicu terjadinya konflik Pemilu 2024 mendatang.

Beberapa perspektif tentang politik identitas dikemukakan oleh para pengkaji kepolitikan kontemporer Indonesia. Diawali dengan pendefinisian yang merujuk pada sejumlah ahli, diantaranya adalah Agnes Haller dan Donald L Morowitz. Sebagaimana dikutip oleh Ubed (2002) dan Ardipandanto (2020) Haller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Pandangan serupa dikemukakan oleh Donald L Morowitz. Sebagaimana dikutip Habodin (2012), dalam pandangan Morowitz politik identitas menjelaskan secara tegas perihal siapa yang akan diikutsertakan dan siapa yang akan dikesampingkan berdasarkan identitas tertentu dari kelompok dalam suatu aktifitas politik. Kemudian, oleh sebab garis batas pemisah dan identifikasi itu tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota atau bukan anggota kelompok berdasar identitas itu dengan dengan sendirinya tampak bersifat permanen.

Pandangan Haller dan Morowitz memiliki suatu benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Dalam kerangka dasar konseptual ini, politik identitas sebetulnya hadir sebagai bentuk kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular (khas) dalam bentuk relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama. Akan tetapi dalam praktiknya kemudian, gagasan politik identitas mengalami transformasi menjadi instrumen politik untuk meraih kekuasaan dan/atau mempertahankan status quo oleh para aktor politik (Nasrudin, 2018; Habodin, 2012). Dengan narasi yang lebih asertif, Husni Mubarak (2018) bahkan mendefinisikan politik identitas sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang untuk meraih kekuasaan dengan memanfaatkan kesamaan identitas tertentu dengan mayoritas para pemilihnya.

Fenomena tersebut antara lain dapat ditemukan dalam tulisan Aryojati Ardipandanto, “*Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme*” (2020). Dalam tulisannya, Ardipandanto membahas isu politik identitas yang marak digunakan dalam Pemilu 2019, baik oleh Paslon nomor 1 maupun Paslon nomor 2, dengan perspektif populisme berbasis agama yang dalam hal ini Islam. Intisari pandangan Ardipandanto bahwa populisme sebetulnya hal biasa dan bisa dipahami dalam konteks strategi pemenangan pemilu. Tetapi menjadi berbahaya ketika hal ini dilakukan dengan kebablasan. Dalam konteks ini Ardipandanto melihat kubu Paslon nomor 2 banyak menggunakan strategi populisme berbasis agama Islam. Narasi yang dibangun, dikembangkan dan diindoktrinasikan adalah bahwa lawannya, kubu Paslon nomor 1 adalah kelompok yang “tidak Islami” atau sebutan lain yang menunjukkan kesan bahwa dengan mendukung Paslon Nomor 1 adalah suatu dosa atau menyalahi aturan agama, tidak berpihak pada kepentingan umat Islam.

Strategi populisme dalam kerangka penggunaan politik identitas berbasis agama untuk memenangi kontestasi Pemilu ini berbahaya, selain karena berbenturan dengan kondisi natur bangsa Indonesia yang heterogen, juga menegasikan esensi Pemilu sebagai arena kontestasi gagasan sekaligus penguatan demokrasi. Dalam situasi ini masing-masing massa pendukung lebih tenggelam kedalam arus konflik horisontal yang dapat menghancurkan kohesivitas sosial dan sendi-sendi bangunan integrasi negara-bangsa daripada fokus pada platform dan program-program visioner para kandidat.

Selain isu politik identitas yang dikapitalisasi sebagai instrumen pemenangan kontestasi kekuasaan, faktor non-elektoral lain yang potensial dapat memicu terjadinya konflik Pemilu adalah gejala polarisasi Politik. Secara umum terma Polarisasi Politik dimaknai sebagai gejala keterbelahan masyarakat kedalam dua kubu (polar) politik secara diametral. Dalam pandangan J.Q. Wilson keterbelahan ini dilatarbelakangi oleh faktor keterikatan yang kuat terhadap ideologi atau komitmen terhadap kandidat sehingga memecah suatu kelompok dengan kelompok lainnya (Annas dkk, 2019). Menurut Nolan McCarty polarisasi juga bisa terjadi karena perbedaan dalam menyikapi isu-isu fundamental (Assyaukanie, 2022); bisa juga karena kebencian terhadap agama dan etnik dalam opini publik (Muhtadi, 2021), dan/atau maraknya klaim politik identitas (Tapsell, 2019).

Dalam sejarah politik elektoral Indonesia, fenomena polarisasi yang tajam seperti terjadi pada Pemilu 2019 lalu merupakan isu yang relatif baru. Karenanya riset dan kajian seputar isu ini belum cukup banyak dilakukan para ahli. Di tengah kelangkaan kajian ini penulis berhasil menelusuri beberapa tulisan yang relevan, salah satu yang menarik adalah tulisan Abdul Gaffar Karim, “*Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset*” (2019). Dalam tulisannya, Karim mengingatkan bahwa gejala polarisasi masih akan terus hadir dalam

konteks elektoral Indonesia. Oleh sebab itu kajian-kajian yang lebih luas dan mendalam akan sangat dibutuhkan, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan akademik bagaimana mengelola polarisasi dengan tepat dan bijak, khususnya melalui perhelatan sirkulasi kekuasaan (pemilu).

Poin paling penting dari tulisan Karim adalah tesisnya terkait agenda riset seputar polarisasi ini. Bahwa kajian tentang polarisasi politik dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, melihat polarisasi sebagai variabel yang disebabkan oleh politik elektoral. *Kedua* melihat bagaimana polarisasi sosial dalam masyarakat dikelola lewat politik elektoral (baik untuk meredamnya, maupun untuk memudahkan mobilisasi massa). Kedua cara ini sama-sama bisa dilakukan untuk memperdalam kajian tentang polarisasi politik di Indonesia.

Faktor non-elektoral lain yang dapat memicu konflik dalam perhelatan Pemilu 2024 adalah isu Infodemi Elektoral. Konsep Infodemi diintroduksi oleh World Health Organization (WHO) dan menjadi populer sejak wabah Covid-19 melanda dunia. Istilah Infodemi merupakan kependekan dari dua kata yang digabungkan, yakni *information* dan *pandemic*. Jika digabungkan kedua kata ini membentuk satu frasa baru yakni *information pandemic* atau “Pandemi Informasi”. WHO kemudian memaknainya sebagai terlalu banyaknya informasi yang beredar, termasuk informasi yang salah dan menyesatkan baik secara fisik maupun digital selama masa pandemi Covid-19 (World Health Organization, 2022).

Dengan uraian yang lebih elaboratif, Hermin Indah Wahyuni (2020) menjelaskan, bahwa gejala infodemi merupakan situasi ketika informasi menyebar secara deras dan cepat dalam jumlah yang melimpah (*overload of information*) dengan akurasi yang tidak jelas, rendah dan sulit diandalkan. Ia tak ubahnya seperti pandemi. Kemunculan dan merebaknya gejala infodemi ini biasanya terjadi dalam situasi-situasi sosial yang penuh dengan ketidakpastian, salah satunya misalnya ketika terjadi pandemik. Kemudian bahayanya, dalam situasi demikian, limpahan informasi (*overload of information*) biasanya juga diiringi dengan kondisi *equivocality* yakni suatu kondisi ketika semua informasi dianggap memiliki derajat kebenaran yang sama (*equal*) (Wahyuni, 2020).

Merujuk pada pemaknaan WHO dan substansi penjelasan fenomenologis dari Wahyuni, “Pandemi Informasi” sesungguhnya juga telah dan secara hipotetik potensial akan terus berlangsung menyertai perhelatan elektoral. Berbasis perspektif ini penulis menggunakan istilah “Infodemi Elektoral” untuk menjelaskan pandemi atau wabah informasi dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Suatu fenomena dimana informasi-informasi seputar kepemiluan mengarus deras dan melimpah (*overload of information*) di ruang publik dengan tingkat akurasi yang rendah. Dalam konteks inilah berita bohong (*hoax*), berita palsu (*fakenews*), kampanye hitam (*black*

campaign), bahkan juga ujaran kebencian (*hate speech*) dan fitnah memperoleh ruang artikulasinya.

Berdasarkan penelusuran literatur, isu mengenai infodemi ini telah banyak dikaji para ahli. Namun sebagian besar kajian membahas isu ini tidak dalam kerangka perhelatan elektoral. Isu infodemi lebih banyak didiskusikan dalam kaitannya dengan gejala pandemi Covid-19 dan/atau literasi digital. Misalnya tulisan Rachmad Gustomy, "*Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter*" (JIIP, 2020). Artikel ini menggambarkan bagaimana gejala infodemi (khususnya yang berkembang di platform *twitter*) seputar Covid-19 telah membelah masyarakat secara politik kedalam dua kutub. Yakni: kluster populis pluralis dan kluster populis Islam. Kedua kutub politik ini terbelah dalam merespon dan menyikapi wacana kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19. Mereka bertengkar dan saling menyerang di ruang publik. Menjadi sangat ironis ketika pertengkar kedua kutub yang sama-sama didominasi para *buzzer* ini telah menenggelamkan suara-suara kelompok kritis dan rasional.

Faktor non-elektoral terakhir yang dapat memicu terjadinya konflik dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang adalah berkenaan dengan keberadaan *buzzer* politik dan perilakunya. Pada mulanya istilah *Buzzer* merupakan konsep dalam dunia bisnis, lebih tepatnya dalam bidang pemasaran ekonomi. *Buzzer* merupakan teknik pemasaran barang atau jasa yang menggunakan kekuatan matarantai informasi dari mulut ke mulut untuk menghasilkan bisnis yang menguntungkan (Mustika, 2019). Seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi media sosial, istilah *Buzzer* kemudian menjadi populer dan berkembang masif. *Buzzer* kemudian tidak hanya berfungsi sebagai pengunggah cuitan di media sosial, tetapi juga menjalankan fungsi-fungsi kampanye kepada *follower buzz marketing*.

Bertolak dari konsepsi dasar tersebut, maka penggunaan *buzzer-buzzer* media sosial pada mulanya adalah untuk melawan atau menegasikan kampanye hitam terhadap seorang kandidat, sekaligus untuk meningkatkan citra positifnya di mata publik agar berpengaruh positif secara elektoral (CIPG, 2019). Dengan cara demikian, dalam kerangka kepentingan politik elektoral ini keberadaan *buzzer* jelas positif. Mereka memberikan manfaat dalam membangun opini seputar kandidat yang dapat memberikan insentif elektoral berupa citra positif. Dengan begitu kandidat politik yang dipromosikannya tidak kalah lalu tenggelam oleh sebab tebaran fitnah para kompetitornya (Mustika, 2019; Syahputra, 2017).

Sayangnya, dalam perkembangan mutakhir kepolitikan dan demokrasi elektoral Indonesia, *buzzer-buzzer* ini kemudian mengalami pergeseran fungsi yang cukup drastis. Mereka kini cenderung lebih merupakan perangkat para kontestan untuk kepentingan mengoperasikan berbagai strategi dan bentuk kampanye hitam atau kampanye negatif tanpa

dasar bukti otentik dan tanpa argumen yang kuat. Selain itu, mereka juga kerap terlibat secara masif dalam penyebaran *hoax* dan/atau ujaran kebencian. Target sasarannya adalah menjatuhkan lawan-lawan politik, bukan membentengi kandidatnya sendiri dengan pengembangan opini positif untuk kandidatnya.

Para ahli dan pengamat kepemiluan di Indonesia telah banyak yang mengkaji seputar peran dan perilaku para *buzzer* dalam aktifitas politik sebagaimana diuraikan diatas, khususnya dalam konteks kegiatan pemilu. Salah satu kajian yang relevan misalnya dipublikasikan oleh Christiany Juditha dalam tulisan bertajuk “*Buzzer* di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia” (2019). Dalam kajian Juditha, terungkap bahwa para *buzzer* dalam ajang Pemilu maupun Pilkada seringkali menjadi para pelaku penyebaran *black campaign* tentang lawan-lawan politik dari kandidat yang didukungnya. Cara-cara kampanye hitam yang demikian ini menjadikan para *buzzer* akhirnya tenggelam dalam aktifitas penyebaran *hoax*, ujaran kebencian, bahkan fitnah yang membahayakan. Padahal seperti sudah diulas di depan tadi, seharusnya mereka dipersiapkan sebagai personel tim sukses untuk membangun citra positif para kandidat.

Membandingkan dengan kajian-kajian terkait sebagaimana diulas di atas, riset ini merupakan studi yang lebih utuh seputar faktor-faktor non teknikalitas kepemiluan yang dapat memengaruhi munculnya konflik pemilu. Dalam hal ini, ruang lingkup kajian meliputi isu-isu penting yang menyertai perhelatan pemilu, yakni isu penggunaan politik identitas, gejala polarisasi sosiopolitik, gejala wabah informasi kepemiluan, serta keberadaan dan perilaku *buzzer*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang sepenuhnya didasarkan pada sumber-sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, meliputi buku, dokumen peraturan perundangan, jurnal-jurnal ilmiah, serta artikel dan opini di media masa baik digital maupun cetak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan karena ruang lingkup permasalahan yang cukup luas dan memiliki keterkaitan fenomenologis yang multidimensi di antara isu-isu, data/informasi, fakta dan peristiwa-peristiwa empiriknya. Alasan lain terkait konteks isu yang dibahas dalam studi ini. Bahwa pendekatan kualitatif lebih cocok dan kompatibel digunakan untuk mengeksplorasi dan memetakan secara kritis, sistematis dan komprehensif pelbagai isu non-elektoral yang dapat menimbulkan problematika serius dan memicu terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dengan metode ini diharapkan isu-isu pokok dan ruang lingkup kajian dapat dieksplorasi, dipahami dan dipetakan secara utuh, sistematis dan komprehensif. Sebagaimana dikemukakan Devine, pendekatan

kualitatif memiliki kelebihan antara lain dapat mengeksplorasi secara leluasa keyakinan, pandangan, dan sikap narasumber; serta dapat menjelaskan pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”, bukan sekedar pertanyaan “apa” (Harrison, 2009 :92).

Sesuai dengan jenis studi, yakni studi kepustakaan, maka data dan informasi dalam penelitian ini dieksplorasi dan dihimpun (*data collection*) melalui teknik dokumen. Data dan informasi dalam kajian ini diperoleh dan diseleksi sesuai kebutuhan melalui sumber-sumber sekunder, meliputi literatur ilmiah sebagai basis teoritik, perspektif dan analisis. Data dan informasi juga diperoleh melalui peraturan perundangan yang relevan, dokumentasi pemberitaan, fakta-fakta fenomenologis yang berkembang di ruang publik, serta pandangan para pihak (pelaku peristiwa, pengamat dan ahli) yang diperoleh dari berbagai media massa, cetak maupun digital.

Kemudian untuk berbagai data atau informasi yang berasal dari sumber-sumber sekunder yang bersifat meluas (*convergen*), tidak konsisten bahkan kontradiktif, peneliti menggunakan teknik triangulasi (*triangulation*) seperlunya. Teknik ini penting untuk memberikan keyakinan kepada peneliti dalam memutuskan data atau informasi mana yang digunakan sebagai sumber yang valid dalam membuat analisis dan kesimpulan penelitian.

Terakhir mengenai analisis data. Sesuai karakteristik pendekatan kualitatif, teknik analisis data dalam studi dilakukan simultan dengan tahapan pengumpulan data. Artinya analisis dilakukan pada setiap fase pengumpulan data. Merujuk Sugiyono (2008), fase pertama analisis dilakukan pada saat peneliti mulai mengumpulkan berbagai data sekunder. Fase kedua analisis adalah menentukan fokus isu apa saja yang menjadi sentral kajian melalui teknik analisis taksonomi (pengkategorian isu-isu yang relevan). Fase ketiga analisis data dilakukan dengan teknik analisis komponensial (bagian-bagian dari setiap isu pembahasan). Merujuk pandangan Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dalam studi ini dilakukan secara interaktif melalui rangkaian proses pengumpulan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengujian (*verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Identitas, Alat Pemenangan Kontestasi

Isu politik identitas dalam konteks perhelatan elektoral di Indonesia mengemuka dan mendapat perhatian serius sejak Pemilu 2014, kemudian mengalami peningkatan yang tajam pada Pilkada DKI 2017. Fenomena ini diawali dengan blunder yang dilakukan Ahok ketika menyinggung Al Quran Surat Almaidah 51, yang memicu reaksi umat Islam, khususnya di Jakarta (www.metro.tempo.co, 26 Desember 2017). Reaksi ini diikuti kemudian oleh demonstrasi 411 (4 November 2016) di depan Istana yang diikuti sekitar 200 ribu orang, hanya sekitar tiga bulan sebelum pencoblosan. Demonstrasi

lebih besar digelar pada 2 Desember 2016 atau Aksi Damai 212 dengan isu menuntut Ahok nonaktif dari jabatan gubernur setelah dijadikan tersangka kasus penodaan agama. Wacana yang dibangun sampai menysasar Presiden Jokowi.

Selain ditandai dengan aksi-aksi tersebut, indikasi terjadinya peningkatan tajam penggunaan politik identitas dalam Pilkada DKI 2017 juga diwarnai oleh pertengkaran antar massa pendukung Anies dan Ahok di berbagai platform media sosial, bahkan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Salah satu yang dianggap paling brutal misalnya ialah beredarnya spanduk dengan narasi “larangan menyolatkan jenazah para pendukung Ahok” (*www.metro.tempo.co*, 25 Februari 2017). Dalam kerangka rangkaian elektoral isu politik identitas pada Pilkada DKI 2017 ini menjadi residu yang kemudian merebak kembali dengan tensi yang tak kalah kuat pada Pemilu serentak 2019. Aspek identitas primordial yang menjadi titik tekan pada ketiga perhelatan elektoral itu adalah agama dan etnisitas.

Politik identitas yang sebetulnya hadir sebagai bentuk kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular (khas) dalam bentuk relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama, dalam praktiknya kemudian, gagasan politik identitas mengalami transformasi menjadi instrumen politik untuk meraih kekuasaan dan/atau mempertahankan *status quo* oleh para aktor politik. Dalam posisi sebagai alat untuk memenangi kontestasi kekuasaan, politik identitas dikapitalisasi secara brutal dengan mengabaikan dampak sosiopolitik yang dapat diakibatkannya. Inilah yang tampak secara fenomenal terutama dalam Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 lalu.

Dalam kasus Pilkada DKI 2017 wajah politik identitas mengemuka melalui berbagai bentuk ekspresi dan artikulasi. Kesemua bentuk pengejawantahan itu bermuara pada identitas pembeda dua aspek primordial, yakni agama dan etnis yang melekat pada figur calon gubernur, terutama Basuki Tjahya Purnama (Ahok yang Kristen dan beretnik Tionghoa) dan Anies Rasyid Baswedan (Anis, Muslim dan beretnik Arab). Keduanya mewakili dua kutub identitas yang secara diametral, bukan saja berbeda tetapi juga saling berhadapan dalam situasi kontestatif.

Dalam situasi kontestatif itu kubu Anies “diuntungkan” dengan terjadinya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, yang sesungguhnya mungkin tidak pernah disengaja untuk menistakan agama Islam namun kemudian berkembang menjadi kasus *blasphemy* hingga memicu lahirnya aksi berjilid-jilid oleh kelompok umat Islam Jakarta yang kemudian dikenal dengan Kelompok 212. Penyebutan ini merujuk pada aksi damai besar-besaran menuntut Ahok dipidana karena kasus Surat Al Maidah 51 yang dipusatkan di silang Monas Jakarta yang kabarnya diikuti oleh jutaan umat Islam. Kubu Anies mengkapitalisasi kasus ini untuk kepentingan mobilisasi pemilih demi meraih kemenangan dalam Pilkada.

Dan akhirnya memang terbukti, Anies yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno berhasil memenangi Pilkada di putara kedua. Fenomena politik identitas dalam Pilkada 2017 yang telah menimbulkan problematika kebangsaan karena efek daya sebarannya yang sangat luas itu kembali terjadi menjelang dan sepanjang perhelatan Pemilu 2019. Tetapi agak berbeda dengan yang terjadi dalam Pilkada DKI, gejala politik identitas dalam Pemilu 2019 tidak secara vis-à-vis menghadapkan dua identitas primordial yang berbeda. Dalam kasus Pilkada DKI politik identitas lebih ke pengidentifikasian dan stigmatisasi oleh masing-masing kubu terhadap kubu lawannya.

Kala itu kubu Jokowi-Ma'ruf distigmatisasi dengan beragam identitas buatan yang dikapitalisasi nyaris tanpa henti sepanjang, bahkan setelah Pemilu 2019 usai. Mulai dari Jokowi keturunan PKI, antek asing-aseng, anti atau phobia Islam, penghayat aliran kepercayaan, pendukung dan pelindung LGBT dan lain-lain. Adapun kepada kubu Prabowo-Sandiaga disematkan berbagai tudingan stigamtis seperti Prabowo seorang ultra-nasionalis, Prabowo Natalan, pendukung Islam radikal dan khilafah, dan seterusnya (Factsheet Politik Identitas, *Puskapol UI, 2020*). Kesemua isu yang disematkan oleh masing-masing kubu atau pendukungnya kepada kubu lawan dan/atau pendukungnya itu merupakan isu-isu non-elektoral yang tidak ada kaitannya langsung dengan aspek-aspek teknisitas kepemiluan. Melalui berbagai isu ini kedua kubu saling serang untuk meraih simpatik publik dan pemilih, meski keduanya menolak dituding sebagai telah memanfaatkan dan mengkapitalisasi isu-isu identitas untuk kepentingan pemenangan kontestasi.

Kubu Jokowi-Ma'ruf menuding kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan propaganda model Rusia dengan strategi *firehose of falsehood*, yakni menggunakan semburan kebohongan dalam kampanye untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, kubu Jokowi-Ma'ruf juga menuding kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan strategi *politic of fear* (politik ketakutan) dalam kampanye (Factsheet Politik Identitas, *Puskapol UI, 2020*). Sebaliknya kubu Prabowo-Sandiaga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf melakukan strategi *playing fvictim* terkait isu identitas, yang justru kemudian mempraktikkan politik identitas dengan manuver memilih seorang Kyai sebagai Calon Wakil Presiden. Selain itu, kubu Prabowo-Sandiaga juga menuduh kubu Jokowi-Ma'ruf melakukan tudingan *hoax* untuk mengaburkan fakta-fakta terkait kegagalan pemerintah Jokowi sebelumnya dan melemahkan data serta argumen yang dikemukakan tim Prabowo-Sandiaga (Factsheet Politik Identitas, *Puskapol UI, 2020*).

Dampak saling serang dengan cara mengkapitalisasi isu-isu identitas sebagai salah satu faktor non-elektoral untuk meraih simpati dan memenangi kontestasi itu terbukti telah melahirkan kegaduhan dan pertengkaran di dalam masyarakat, baik di ruang-ruang digital maupun di

dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat. Akibatnya ditemukan banyak kasus dalam satu keluarga atau antar tetangga bertengkar lantaran beda dukungan dan pilihan. Tebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi dan kemudian memengaruhi persepsi dan perilaku elektoral para pemilih dari masing-masing kubu ini akhirnya mengarahkan masyarakat Indonesia pada situasi keterbelahan (polarisasi) sosial-politik di berbagai daerah.

Pemilu yang sejatinya memang merupakan ajang konflik politik untuk memperebutkan kekuasaan, namun yang didesain demikian rupa pelaksanaannya hingga tetap berlangsung tertib dan damai, dengan pengerasan dan eskalasi isu-isu identitas yang terus berkembang konflik Pemilu menjadi tidak mudah dikelola dan dikendalikan. Pangkal sebabnya karena ada faktor non-elektoral yakni identitas primordial yang dirasakan oleh masing-masing kubu pendukung sebagai gangguan dan serangan yang wajib dilawan.

Polarisasi, Pembelahan yang Membahayakan

Dalam tradisi demokrasi yang menghargai keragaman dan kebebasan, polarisasi adalah suatu keniscayaan. Ia merupakan gejala yang tidak mungkin dihindari apalagi diberangus, termasuk kemunculannya dalam lanskap perhelatan kontestasi elektoral. Dalam konteks elektoral, sebagaimana diungkapkan James Q. Wilson (Testriono, 2018), komitmen kuat terhadap kandidat merupakan salah satu alasan bagi massa untuk dengan mudah terpolar kedalam dua kutub politik yang berseberangan.

Tentu saja polarisasi juga dapat dipicu oleh faktor-faktor lain, misalnya ideologi dan penyikapan publik terhadap suatu isu atau kebijakan pemerintah. Di Amerika Serikat dan Inggris, dua negara demokrasi yang telah mapan misalnya, polarisasi muncul dan terus bertahan dalam waktu yang relatif panjang karena dipicu oleh perbedaan ideologi yang kemudian berimplikasi pada kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang memenangi kontestasi pemilu.

Polarisasi di Amerika memperhadapkan kubu konservatif yang direpresentasikan oleh Partai Republik dan kubu liberal yang diwakili oleh Partai Demokrat. Sementara di Inggris polarisasi telah membelah elit dan massa kedalam spektrum kanan-kiri, yang masing-masing direpresentasikan secara politik oleh Partai Konservatif dan Partai Buruh. Dengan demikian, polarisasi sesungguhnya merupakan fenomena sosio-politik, bukan bagian dari urusan teknisitas kepemiluan, yang oleh karenanya bisa saja muncul dan berkembang di luar konteks perhelatan pemilu sebagaimana disinggung di depan.

Di Indonesia gejala polarisasi dalam pengertian terbelahnya masyarakat secara politik kedalam dua kutub (polar) yang berseberangan secara tajam muncul menjelang dan menyertai perhelatan Pemilu. Gejala polarisasi ini hadir secara masif untuk pertama kalinya pada perhelatan

Pemilu 2014. Gejala ini terus bertahan pasca Pemilu 2014, kemudian mengalami peningkatan pada perhelatan Pilkada DKI tahun 2017 (Hadiz, 2018; Mietzner dan Muhtadi, 2018), dan semakin menajam pada Pemilu 2019 lalu (Warburton, 2021). Hal yang menarik dari ketiga peristiwa elektoral ini adalah, bahwa peta polarisasi berlangsung ajeg melibatkan dua kelompok massa, meski Pilkada DKI tentu merupakan pemilu lokal.

Kedua kelompok massa tersebut adalah kelompok Islam Modernis dan Fundamentalis (Aspinal, 2019) yang berada dibelakang Prabowo-Hatta (Pemilu 2014) serta Prabowo-Sandiaga (Pemilu 2019) di satu kubu dan kelompok Islam Tradisional dan Nasionalis termasuk non-Muslim yang berada di barisan Jokowi-Kalla (Pemilu 2014) dan Jokowi-Mar’ruf (Pemilu 2019) pada kubu yang lain. Dalam Pilkada DKI 2017 kelompok pendukung Prabowo berada di belakang Anis-Sandiaga dan kelompok pendukung Jokowi menjadi penyokong Ahok-Djarot.

Sejumlah penanda fenomenologis polarisasi ini muncul dalam berbagai stigmatika sosiopolitik yang mengandung ejekan, tuduhan dan serangan terhadap masing-masing kubu, misalnya “radikal, antek-antek Cendana, Kampret, dan terakhir Kadrun (kadal gurun)” yang disematkan kepada para pendukung Prabowo, Sandiaga, Anis; dan “anti-Islam, komunis, antek-antek China, dan Cebong” untuk para pendukung Jokowi, Ma’ruf, Ahok. Gejala polarisasi sebagaimana diuraikan diatas tentu saja tidak sehat dilihat dari sisi manapun. Pembelahan sosiopolitik yang demikian rupa, jika terus berlangsung, lalu semua pihak membiarkannya akan sangat berbahaya bagi kelangsungan persatuan dan keutuhan negara-bangsa. Pada saat yang sama, konsolidasi demokrasi yang diperjuangkan bersama dengan susah payah juga akan kehilangan makna substantifnya.

Perhelatan politik elektoral yang mestinya menjadi arena kontestasi gagasan dan kandidat-kandidat para pemimpin bangsa hanya akan menjadi ajang untuk saling menebar kebencian dan permusuhan diantara elemen-elemen bangsa. Dalam kerangka inilah seruan dan berbagai ikhtiar menjelang perhelatan Pemilu 2024 perlu terus dilakukan oleh semua pihak.

Infodemi Elektoral, Wabah Ganas Demokrasi

Infodemi elektoral adalah fenomena yang menggambarkan informasi-informasi seputar kepemiluan mengarus deras dan melimpah (*overload of information*) menyerupai wabah penyakit di ruang publik dengan tingkat akurasi dan kesahihan yang rendah. Bentuk dan kemasan ekspresi dan artikulasinya beragam, demikian pula saluran media yang digunakan untuk menyebarkanluaskannya. Namun yang paling banyak muncul dalam bentuk narasi tertulis, narasi verbal atau perpaduan keduanya, yang dikemas dalam format potongan-potongan video hasil suntingan, kemudian disebarluaskan di berbagai platform media sosial seperti facebook, youtube, twitter, instagram dan whatsapp. Tidak sedikit juga yang tersebar di berbagai

situs berita *online* palsu atau *scam* yang sama sekali tidak kredibel. Dalam konteks ini berita bohong (*hoax*), berita palsu (*fake news*), kampanye hitam (*black campaign*), bahkan juga ujaran kebencian (*hate speech*) dan fitnah memperoleh ruang artikulasinya.

Pada Pemilu 2019 gejala infodemi elektoral ini berlangsung masif menyertai perjalanan pelaksanaan tahapan pemilu. Data yang dirilis Kemenkominfo menyebutkan bahwa sepanjang waktu antara Agustus 2018 hingga September 2019 (rentang waktu sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu serentak) terdapat 916 konten *hoax* seputar Pemilu (www.kominfo.go.id, 1 Oktober 2019. Diakses tanggal 14 Agustus 2023). Konten-konten *hoax* ini memuat sejumlah isu sensitif yang berkategori berita bohong, propaganda, fitnah, dan kampanye hitam. Beberapa diantaranya (selektif) sebagai berikut:

Data per bulan Agustus 2018: “Cina minta Jokowi jual Pulau Jawa dan Sumatra; Banser resmi dukung Prabowo Sandi; Survei kemenangan Prabowo; Badai pasir terjadi karena spanduk #2019gantipresiden, dan Megawati setuju PKI bangkit”. Data per bulan September 2018: “Pelaku bom bunuh diri di Surabaya masih hidup dan dukung 2019 ganti presiden; Prabowo mempunyai utang sebesar Rp 17 triliun; PDIP Menerima Kunjungan PKI China; Penambahan angka '0' dalam nomor urut pasangan capres-cawapres dituding akan berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Data per bulan Oktober 2018: “Rekening Gendut Jokowi di luar negeri yang tidak dilaporkan; Pemerintah akan segera mengesahkan UU LGBT; KH Ma'ruf Amin Mencium Pipi Wanita Bukan Muhrim; Kemendagri selundupkan 31 data pemilih baru”. Data per bulan November 2018: “PDIP minta seluruh pesantren ditutup; Fatwa Haram Memilih PSI untuk Warga Muhammadiyah; Kelompok Mahasiswa Cipayung Plus Terima Uang dari BIN untuk Tidak Mengkritisi dan Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin; Jika Menang, Jokowi Akan Ganti KH Ma'ruf Amin dengan Ahok; Atas Keinginan Jokowi, China Segera Kirim 3 juta Warganya ke Indonesia”. Data per bulan Desember 2018: “Surat Presiden Jokowi Meminta Dukungan kepada BUMN untuk Pemenangan Pilpres 2019; Ancaman Pembunuhan pada Anggota KPU Jika Tak Menangkan Jokowi di Pilpres 2019; Jokowi bagi-bagi uang di Ngawi pada Desember 2018; Pendetang Cina diberi arahan KPU untuk mencoblos di TPS”.

Menjelang perhelatan Pemilu 2024 yang tinggal hitungan bulan ini, wabah informasi seputar kehidupan sosial-kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan juga mulai marak di ruang publik. Sebagian memuat isu-isu baru, sebagian lagi adalah berisi isu-isu lama (residu) yang beredar di seputaran pelaksanaan Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 yang direproduksi oleh para pembuat kontennya dengan mengaitkannya dengan dinamika mutakhir kepemiluan yang sedang berlangsung.

Temuan Presidium Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo) misalnya, pada triwulan pertama tahun 2023 ini telah muncul sebanyak 664 serangan *hoax* politik terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024 (www.antaranews.com., “*Mafindo Catat 664 Hoaks Selama Kuartal I-2023*”, 3 Mei 2023. Diakses 14 Agustus 2023). Sementara itu, jauh sebelumnya Kementerian Kominfo merilis bahwa hingga Januari 2023 sudah terdeteksi ada sekitar 1.321 konten *hoax* politik termasuk di dalamnya terkait isu Pemilu (www.liputan6.com., “*Ribuan Konten Hoaks Politik Mulai Muncul Jelang Pemilu 2024*”, 5 Januari 2023. Diakses tanggal 14 Agustus 2023). Terkait fakta ini, Menkominfo Johnny G. Plate mengklaim bahwa pihaknya telah menangani dan menutup semua konten *hoax* tersebut.

Akan tetapi *hoax* dan *fakenews* terkait dinamika sosiopolitik yang dengan mudah (cepat atau lambat) dapat memberi dampak negatif seperti memicu konflik, dan memperparah polarisasi masyarakat terhadap rangkaian kegiatan Pemilu terus bermunculan dan mewabah di ruang digital. Sekadar menyebut beberapa contoh konten *hoax* dan *fakenews* yang sesungguhnya merupakan isu-isu yang tidak berhubungan langsung dengan aspek-aspek teknisitas elektoral itu dapat dikemukakan berikut ini (www.antaranews.com., “*Hoax 2023 - Kumpulan Berita ANTARA News*”. Diakses 15 Agustus 2023).

Pada Januari 2023, sebuah akun facebook bernama Dian Widi mengunggah narasi yang menyatakan bahwa cuti bersama 23 Januari karena ulang tahun Megawati. Narasi utuhnya sebagai berikut: “Bukan Imlek, Inilah Alasan Dibalik Cuti Bersama 23 Januari: Hari Lahir Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hj. Megawati Soekarno Putri”. Berdasarkan situs resmi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, jadwal libur dan cuti bersama 2023 telah ditetapkan pada 11 Oktober 2022. Dan dalam cuti bersama tersebut jelas dan resmi dituliskan bahwa 23 Januari merupakan tanggal merah untuk perayaan Imlek 2574 Kongzili yang tepat pada Minggu, 22 Januari 2023.

Pebruari 2023. Sebuah video beredar di twitter, cuitan akun @Mencaricinta99 yang menarasikan tentara China tiba di Indonesia. Narasi utuhnya sebagai berikut: “Sudah terang2an pakai seragam militer? Gila ini beneran.... Tentara Cina sudah masuk Indonesia, tengah malam, untuk Apa?!? Siap2 saja Anak Cucu dijajah Aseng, atau siap jadi Mata2 Cina/Pengkhianat bagi negeri ini!”. Faktanya bahwa konten tersebut merupakan video pasukan Brimob Polri yang baru selesai melaksanakan tugas dalam Operasi Satgas Damai Cartenz di Papua yang pernah diunggah Divisi Humas Mabes Polri dalam akun instragramnya.

Pada bulan Maret 2023, akun facebook Makruf Buthank mengunggah sebuah tangkapan layar konten situs Internet dengan judul “Jokowi Geram Pulau Maluku Diambil China Sebagian”, disertai status dengan narasi pendek “Ada orang GOBLOK sedang memarahi presiden”. Konten ini disertai

dengan foto Presiden Jokowi yang tampak sedang berpidato dengan baju batik dan latar belakang Bendera Merah Putih. Faktanya unggahan yang tampak pada facebook itu merupakan hasil penyuntingan dari konten sebenarnya yang berberjudul “Sisa Setahun Berkuasa, Jokowi Baru Fokus Atasi Stunting dan Kemiskinan”, diunggah oleh situs DemoCrazy.

Pada bulan April 2023, beredar sebuah video di *youtube* berdurasi 8 menit yang menginformasikan bahwa Jokowi menonaktifkan KPK mulai tanggal 12 April. Pada layar video itu disematkan teks “BREAKING NEWS: JOKOWI RESMI NON AKTIFKAN KPK MULAI HARI INI”. Faktanya dalam unggahan video tersebut tidak terdapat narasi maupun video pernyataan Presiden Jokowi untuk menonaktifkan KPK. Video itu hanyalah kompilasi potongan video tentang Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro.

Mei 2023. Sebuah cuitan di *twitter* mengabarkan bahwa Harry Tanoe ditetapkan sebagai Menteri Kominfo dengan narasi: “Harry Tanoe jadi Menkominfo. Perindo gabung koalisinya Prabowo. Tionghoa Hakka; Rise of China Blues (?)”. Faktanya tidaklah demikian. Menteri Kominfo pengganti Johnny G. Plate adalah Budi Arie Stiedi yang diangkat pada tanggal 17 Juli 2023. Menyertai dinamika pembentukan koalisi partai politik sekaligus pra-kandidasi pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung hingga Oktober nanti tebaran *hoax* dan *fakenews* di ruang digital kian melimpah. Di bulan Juni misalnya beredar video dengan narasi: “Anak Indonesia kerja di negara China korban para calo TKW, tapi sebaiknya diviralkan agar pelakunya tertangkap dan para pencari kerja yang akan dikirim ke luar negeri untuk berhati-hati.” Faktanya ini adalah video perundungan siswa di sebuah provinsi di China. Bulan Juli beredar sebuah video dengan narasi: “TAK DIKASIH AMPUN, MASA PENDUKUNG JKW BAK4R RUMAH KETUA BEM UI, TAK TERIMA JUNJUNGANYA DI S3R4N9”. Faktanya video ini merupakan hasil suntingan, penggabungan dua video pada peristiwa yang berbeda. Yaitu kronologi masa bakar ratusan kios di Oksibil Papua dan jadwal lengkap Presiden Jokowi kunjungan ke Samarinda dan Sepaku. Di bulan Agustus beredar foto di *youtube* dengan narasi: “AKSI TURUNKAN JOKOWI SIANG INI! RAKYAT TUNTUT JOKOWI MUNDUR DAN MINTA DPR & MPR GELAR SIDANG ADILI JKW”. Faktanya foto ini merupakan editan dari foto berjudul “Mengenang aksi mahasiswa duduki Gedung DPR untuk lengserkan Soeharto.

Kesemua konten *hoax* dan *fakenews* itu tidak berkaitan langsung dengan aspek-aspek teknisitas kepemiluan. Berbagai isu yang diunggah dan dikemas dalam berbagai platform media digital itu merupakan isu-isu non-elektoral. Akan tetapi pengaruh daya kait dan koneksitasnya dengan rangkaian kegiatan Pemilu secara potensial (langsung atau tidak langsung) dapat memicu, mengkatalisator atau mengeskalasi konflik Pemilu. Daya kait dan koneksitas itu bisa berkenaan dengan peristiwa, figur atau personal

tokoh tertentu, institusi atau organisasi, dan wacana mengenai isu-isu kampanye, serta persepsi dan penyikapan atas peristiwa, tokoh, institusi dan wacana tersebut.

Semua isu non-elektoral dalam semua konten contoh diatas merupakan isu-isu sensitif secara sosiopolitik, sebagian besar merupakan residu dari perhelatan Pemilu 2019 yang hingga sekarang masih terus berkembang dalam masyarakat. Di tengah masyarakat dengan literasi digital rendah, isu-isu non-elektoral tersebut bukan saja mengaburkan realitas yang sesungguhnya terjadi, tetapi juga dengan mudah dapat memicu reaksi negatif dan amarah massa yang berujung pada konflik horisontal Pemilu 2024.

Buzzer, Pemicu Kegaduhan

Faktor non-elektoral terakhir yang potensial dapat memicu terjadinya konflik Pemilu adalah isu keberadaan dan perilaku *buzzer* atau yang kerap disebut juga sebagai pasukan *cyber*, yang dengan sengaja dan terprogram disiapkan oleh masing-masing kubu kontestasi.

Di depan telah disinggung, bahwa sejatinya para *buzzer* disiapkan sebagai instrumen untuk membangun branding positif para kandidat. Namun dalam praktiknya kehadiran dan peran para *buzzer* dalam ajang Pemilu maupun Pilkada, seringkali menjadi para pelaku penyebar *black campaign* terhadap lawan-lawan politik. Para *buzzer* ini merupakan jaringan individu yang cair terdiri dari pendengung, pesohor atau *influencer*, koordinator, dan pembuat konten. Mereka bekerja sama untuk memanipulasi opini publik di media sosial dengan target menyerang, mendiskreditkan atau menjatuhkan kubu lawan.

Berdasarkan hasil penelitian LP3ES, para *buzzer* ini ada yang bekerja dalam satu struktur organisasi yang relatif rapih dan dibayar, ada pula yang bekerja sebagai *voluntir-voluntir* mandiri. Mereka yang berbayar memiliki tarif yang beragam. Untuk *buzzer* biasanya mendapat lima puluh sampai seratus ribu rupiah per akun, yang setiap bulan bisa mengantongi kisaran satu hingga tujuh juta rupiah. Sementara, pencipta konten biasa mendapat kurang lebih empat juta rupiah. Sementara untuk koordinator biasanya mendapat dua ratus ribu rupiah untuk setiap akun yang secara total mendapat lima hingga lima belas juta rupiah. Terakhir untuk *influencer* atau pesohor bisa mengantongi sampai dua puluh juta rupiah atau imbalan non-tunai, seperti posisi komisaris, atau proyek BUMN. Sementara mereka yang *voluntir* umumnya adalah individu-individu yang secara ideologis memiliki kecocokan dengan figur kandidat yang didukungnya.

Terlepas dari kategori manapun, merujuk pada berbagai literatur hasil riset dan/atau pengamatan para ahli dan praktisi, semua sepakat bahwa *buzzer* adalah sosok yang berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi. Felicia (2019) menjelaskan bahwa peran *buzzer* menjadi berbahaya jika

mereka membangun persepsi atau sudut pandang publik terhadap kandidat politik tertentu melalui berita-berita yang bersifat *hoax* atau *hate speech*. Cara kerja *buzzer* seperti itu dinilai mampu menimbulkan perpecahan di masyarakat. Syahputra (2017) menjelaskan bahwa *buzzer* di Indonesia lebih mengedepankan ujaran kebencian, percakapan yang saling mencerca, perdebatan yang penuh amarah bahkan merupakan agen yang menyebarkan *hoax* kepada masyarakat. Inilah yang terjadi dalam perhelatan Pemilu 2014, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 silam.

Pada Pemilu 2024 yang tahapannya makin mendekati fase-fase krusial, terutama nanti menjelang masa pendaftaran pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, berbagai pihak telah mengingatkan perihal potensi bahaya kehadiran dan aksi-aksi *buzzer* yang diperkirakan akan kembali menyesaki ruang digital elektoral 2024 dengan unggahan-unggahan konten negatifnya di berbagai platform media sosial yang memprovokasi situasi kontestasi yang pastinya akan berlangsung panas. Terkait hal itu patut diapresiasi sikap dan rencana Bawaslu RI yang akan menindak tegas para *buzzer* yang dapat merusak pesta demokrasi (*www.kompas.com.*, 14 Juni 2022. Diakses 18 Agustus 2023).

Dalam rangkaian kegiatan Pemilu, *buzzer* atau pasukan cyber ini sesungguhnya bukan merupakan bagian dari aspek teknikalitas kepemiluan. Artinya, tanpa *buzzer* pun pemilu dapat diselenggarakan. Tetapi di era digital kampanye dan upaya membangun citra positif para kandidat memang tidak mungkin dilepaskan dari kebutuhan akan sarana informasi dan komunikasi yang lebih efektif dengan jangkauan yang luas. Maka kehadiran *buzzer* sebagai instrumen kampanye dan pencitraan para kandidat memang menjadi sulit dihindari. Karena merekalah yang akan menjadi operator kampanye dan pencitraan di ruang-ruang digital elektoral. Di sisi lain peran dan perilaku *buzzer* nyata-nyata lebih banyak menciptakan kegaduhan, memprovokasi perpecahan, mendorong pertengkaran dan akhirnya menciptakan konflik Pemilu, baik horisontal maupun vertikal.

KESIMPULAN

Pertama, Pemilu 2024 diperkirakan akan kembali disesaki oleh sejumlah faktor non-elektoral. Faktor-faktor dimaksud sedikitnya terdiri dari 4 (empat) isu krusial, yakni: politik identitas, polarisasi politik, infodemi elektoral dan perilaku *buzzer*. Faktor-faktor non-elektoral ini merupakan residu dari Pemilu dan Pilkada sebelumnya yang hingga saat ini praktis tidak dapat dibersihkan sepenuhnya. Kedua, faktor-faktor non-elektoral sebagaimana item pertama dengan mudah dapat memicu bukan hanya kegaduhan di ruang digital, tetapi juga dapat melahirkan pertengkaran dan konflik Pemilu 2024 yang bisa berujung pada tingkat penerimaan dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu menjadi rendah.

Ketiga, untuk mencegah agar keempat faktor non-elektoral tersebut tidak mempengaruhi secara negatif proses dan hasil Pemilu 2024, diperlukan langkah-langkah antisipasi bersama dan bersifat programatik dari para stakeholder Pemilu, terutama peserta Pemilu dan kubu pendukung masing-masing, baik dalam konteks Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keempat, para peserta Pemilu terutama namun tidak terbatas hanya dalam kontestasi Pilpres, penting untuk menyepakati agar masing-masing berkomitmen untuk tidak menggunakan identitas-identitas primordial sebagai instrumen politik dan bersedia membatasi (jika tidak dapat menghilangkan sama sekali) penggunaan *buzzer* sebagai alat kemenangan pemilu. *Kelima*, Bawaslu bersama sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu diharapkan bekerja lebih profesional, tegas, dan tidak tebang pilih dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait potensi pelanggaran yang dapat ditimbulkan oleh keempat faktor non-elektoral tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Faris Budiman, Hasya Nailan Petranto, dan Asep Aji Pramayoga. 2019. "Opini Publik dalam Polarisasi Politik di Media Sosial". *Jurnal Pikom*, Volume 20 Nomor 2.
- Ardipandanto, Aryojati. 2020. "Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme". *Jurnal Politica*, Volume 11 Nomor 1.
- Assyaukanie, Luthfi. 2022. "Polarisasi dan Merosotnya Demokrasi". *Media Indonesia*, 2 Agustus.
- Felicia, L. R. (2019). "Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter". *Koneksi*, 2(2), 352.
- Gustomy, Rachmad. 2020. "Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter". *Jurnal JIIP*, Volume 5 Nomor 2.
- Haboddin, Muhtar. 2012. "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal". *Jurnal Studi Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1.
- Harrison, Lisa. (2009). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Juditha, Christiany. 2019. "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika*.
- Karim, Abdul Gafar. 2019. "Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset". *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 10 Nomor 2.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, 2022. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*,

- Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jakarta: KPU RI.
- Muhtadi, Burhanudin. 2021. "Resentment, Polarisasi, dan Pilihan Politik", *Media Indonesia*, 6 September.
- Mubarok, Husni. 2018. "Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia". *Jurnal BIMAS ISLAM*, Volume 11 Nomor 2.
- Mustika, Rieka. 2019. "Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial". *Jurnal Diakom*, Volume 2 Nomor 2.
- Nasrudin, Juhana. 2018. "Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)". *Hanifiya Jurnal Studi Agama-Agama*, Volume 1 Nomor 1.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Syahputra, Iswandi. 2016. "Buzzer dan Demokrasi". *Republika.co.id*, 29 September.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), hal. 457.
- Tapsell, Ross. 2019. "Pemilu 2019: Polarisasi Medsos atau Ideologis?". *Tirto.id*, 4 April.
- Tempo.Co*, "Kaleidoskop 2017: Pilkada Brutal Gubernur DKI Jakarta", 26 Desember 2017)
- Tempo.Co*, "Masjid Tolak Salatkan Pemilih Ahok, Begini Reaksi Warga", 25 Februari 2017
- Ubed, S. Abdilah. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Yayasan Indonesiatara.
- Wahyuni, Hermin Indah. 2020. "Infodemi: Gagalnya Komunikasi di Masa Pandemi". *BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia*. Volume 2 Nomor 2, Tahun 2020.
- World Health Organization, 2022. "Infodemic". <https://www.who.int › infode>.